

## ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA TERHADAP KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI PROVINSI PAPUA (TAHUN 1999 - 2016)

Mahmudah<sup>1</sup>

Ida Ayu Purba Riani<sup>2</sup>

*purbariani@feb.uncen.ac.id*

Charley M. Bisai<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana perkembangan tenaga kerja di Provinsi Papua?; Bagaimana perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua? dan Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Papua?. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari jumlah orang bekerja dan jumlah orang miskin kurun waktu tahun 1999-2016. Metode analisis yang di gunakan untuk menjawab tujuan penelitian di atas adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tenaga kerja dengan menggunakan indikator orang bekerja sebelum pemekaran kurun waktu 1999 – 2004 adalah 1023,96 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 21,74 persen. Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata tenaga kerja berjumlah 1320,60 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 71,84 persen. Rata-rata jumlah kemiskinan Sebelum pemekaran yaitu kurun waktu 1999 – 2004 adalah 981,48 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar -14,83 persen. Periode Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata penduduk miskin berjumlah 899,24 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar -1,08 persen. Variabel Dummy (sebelum dan sesudah pemekaran) tidak signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin atau tidak terdapat adanya perbedaan pengaruh masa sebelum pemekaran (1999 - 2004) dan masa sesudah pemekaran (2005-2016). Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui pula bahwa variabel tenaga kerja tidak signifikan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin, bila terjadi kenaikan tenaga kerja sebanyak 1000 orang maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 82 orang di Provinsi Papua.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja, Kemiskinan, Pemekaran Wilayah**

### PENDAHULUAN

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian paling timur wilayah Indonesia. Papua berada dalam satu pulau dengan negara Papua New Guinea (PNG). Bagian barat merupakan bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sedangkan belahan timurnya merupakan negara PNG. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi 2 (dua) provinsi, bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.

Provinsi Papua memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, kondisi geografis dan topografi menjadi salah satu kendala untuk dikembangkan dengan cepat. Limitasi kondisi geografis menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah yang cukup besar karena terjadi aglomerasi/pemusatan kegiatan ekonomi diprovinsi sebelum terjadinya pemekaran wilayah. Pada prinsipnya, pemekaran wilayah dilakukan untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Rasyid, 2007).

Fenomena pemekaran wilayah di Papua setelah pemerintahan orde baru hingga memasuki pemerintahan saat ini menarik untuk ditelaah secara mendalam. Isu pemekaran wilayah terutama di Papua

---

<sup>1</sup> Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

selalu disertai dengan isu-isu seputar reformasi, demokratisasi, HAM (Hak Asasi Manusia) dan keadilan sosial. Khairullah dan Cahyadin, (2006) menyatakan bahwa pemekaran wilayah atau daerah pada dasarnya dilakukan sebagai suatu bentuk upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Faktor-faktor lain yang memicu terjadinya pemekaran wilayah antara lain perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, serta luas daerah. Hal ini didukung dengan pernyataan Ventauli (2009), bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/daerah yang telah ada untuk menjadi negara/daerah baru, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah, selain itu wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Lebih lanjut, menurut laporan Bank Dunia dalam Udiarto (2015), ada empat faktor pendorong adanya pemekaran wilayah di era pasca reformasi, yaitu:

- 1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan ketertinggalan pembangunan;
- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain);
- 3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakan Dana Alokasi Umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD);
- 4) Motif pemburu rente (bureaucratic a political rent-seeking) para elit.

Dikutip dari Papua dalam angka tahun 2010 (BPS Provinsi Papua, 2010) bahwa pada tahun 2010, dengan luas wilayah Papua 317.062 km<sup>2</sup> atau setara dengan 17,04% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>), dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di Indonesia sebesar 1,19% (2.097.482 jiwa), maka kepadatan penduduk yang ada di wilayah Papua hanya sekitar 9 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan fakta ini munculah permasalahan pembangunan di Papua antara lain: pertama, terjadinya ketimpangan pembangunan yang disebabkan karena persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan daerah yang sangat luas. Kedua, terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh tidak adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah Papua sedangkan pusat-pusat kegiatan pembangunan atau perekonomian hanya di daerah tertentu.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan hidup, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial, dan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai (Soebagiyo, 2013).

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010). BPS Provinsi Papua (2017), dalam rilisnya menyatakan bahwa menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah pedesaan. Pada maret 2017 terdapat 36,96% penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan perkotaan hanya sebesar 4,55%. Jika di dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (Maret 2007) terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,09%, sedangkan pada daerah perkotaan penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen.

Selama 17 tahun terakhir (1999-2016) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik, yakni tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,13 persen

yaitu dari 54,75 persen. Yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Pada lima tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 dengan terdapat 4,82 persen penduduk yang pada 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan bergeser di atas garis kemiskinan sehingga tidak menjadi miskin.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan menetapkan judul penelitian “*Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Provinsi Papua (Tahun 1999 – 2016)*”.

### **Rumusan Masalah**

Masalah yang dikaji dan analisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan tenaga kerja di Provinsi Papua?
- 2) Bagaimana perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua?
- 3) Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Papua?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan membahas perkembangan tenaga kerja di Provinsi Papua;
- 2) Untuk menganalisis dan membahas perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua;
- 3) Untuk menganalisis dan membahas pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Papua.

### **Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah serta memberikan kontribusi dalam pemahaman ilmu mengenai tenaga kerja terhadap kemiskinan sebelum dan setelah pemekaran. Serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan hasil dalam penelitian ini bisa di jadikan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### b) Manfaat Praktis

Dari penulisan ini di harapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara konsisten untuk melakukan evaluasi terhadap wilayah pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB), meliputi kinerja perekonomian daerah, kinerja keuangan daerah, kinerja pelayanan publik, serta kinerja aparatur pemerintah daerah. Serta evaluasi terhadap daerah pemekaran perlu dilakukan secara ketat sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku. Bila diketahui kinerja tidak memuaskan atau tidak memenuhi target maka harus dikembalikan kepada wilayah induk atau bergabung pada wilayah tetangganya. Salah satu indikator yang dapat dikerjakan oleh pihak pemerintah adalah melakukan perencanaan terhadap pembangunan ketenagakerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan tenaga kerja dan kemiskinan kurun waktu 1999 – 2016.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data orang bekerja (jiwa) dan orang miskin (jiwa) Provinsi Papua kurun waktu 1999 – 2016 yang peroleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua.

## Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dimaksud berasal dari hasil publikasi pihak-pihak tertentu pemerintah, swasta, dan perorangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Metode Analisis Data

1. Dalam rangka menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana perkembangan tenaga kerja di Provinsi Papua, dan pertanyaan kedua tentang bagaimana perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sulaiman (2015), teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekwensi, diagram, grafik, mean, modus dan lainnya.
2. Dalam rangka menjawab pertanyaan ketiga tentang bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Papua, penulis menggunakan analisis regresi dummy variabel. Untuk memahami model regresi dengan independent dummy variabel maka model yang dibentuk sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 D_t + \beta_2 X_t + \varepsilon_t;$$

(Chaniago, 2008)

Dimana :

$Y_t$  = Kemiskinan (jumlah penduduk miskin dalam satuan jiwa)

$D_t = 0$ , untuk periode sebelum pemekaran

1, untuk periode sesudah pemekaran

$X_t$  = Tenaga kerja (Orang kerja dalam satuan Jiwa)

$\varepsilon_t$  = Error term (kesalahan pengganggu)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan penggunaan dummy variabel, maka perbedaan kemiskinan sebelum dan sesudah pemekaran adalah sebagai berikut :

Sebelum pemekaran :  $Y_t = \beta_0 + \beta_2 X_t$  ; sesudah pemekaran :  $Y_t = (\beta_0 + \beta_1) + \beta_2 X_t$

## Definisi Operasional Variabel

1. Kesempatan kerja merupakan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Dalam penelitian ini kesempatan kerja diukur melalui indikator orang bekerja dalam satuan jiwa atau orang.
2. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang individu atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan vital, seperti, makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Dalam penelitian kemiskinan diukur dengan indikator jumlah penduduk miskin atau orang miskin dalam satuan jiwa atau orang.
3. Pemekaran daerah adalah suatu proses pemecahan daerah kabupaten atau kota atau wilayah provinsi untuk menjadi dua atau lebih daerah yang baru, yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Papua. Pemekaran daerah di Papua dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi durasi waktunya menjadi (tahun 1999 – 2004) sebelum pemekaran dan (tahun 2005 – 2016) sesudah pemekaran.

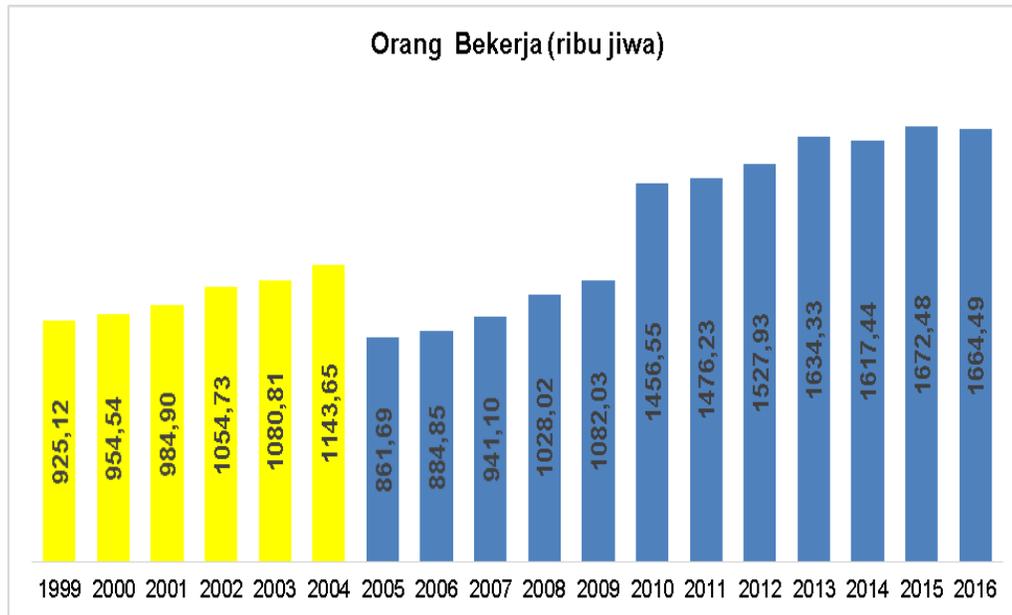
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan dan Jumlah Tenaga kerja di Provinsi Papua

Pada tahun 1999 jumlah penduduk Papua mencapai 1.942.627 dengan jumlah laki-laki 989.582 jiwa dan perempuan 953.045 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 1.148.70 jiwa. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 1999 pada usia 15 tahun keatas berjumlah 925,13 jiwa. Jumlah tenaga kerja

paling paling banyak berada pada kelompok usia 25-29 tahun yang berjumlah 175,00 jiwa. Sedangkan pada tahun 2004, dimana tahun terakhir sebelum terjadinya pemekaran jumlah tenaga kerjanya pada usia 15 tahun keatas mencapai 1.143,65 ribu jiwa. Dimana ini merupakan jumlah terbesar pada masa sebelum pemekaran.

**Gambar 1.**  
**Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Papua (ribu jiwa) Tahun 1999 – 2016**



Sumber : BPS Papua, 2000 - 2017

Saat belum terjadinya pemekaran jumlah tenaga kerja pada usia 15 tahun keatas berjumlah 925.12 jiwa pada tahun 1999, dan terus meningkat hingga tahun 2002 yang jumlah tenaga kerja sekitar 1.054.73 jiwa. Pada tahun 2003 jumlah tenaga kerja meningkat hingga pada tahun 2004, yang jumlahnya sekitar 1.143.65 jiwa.

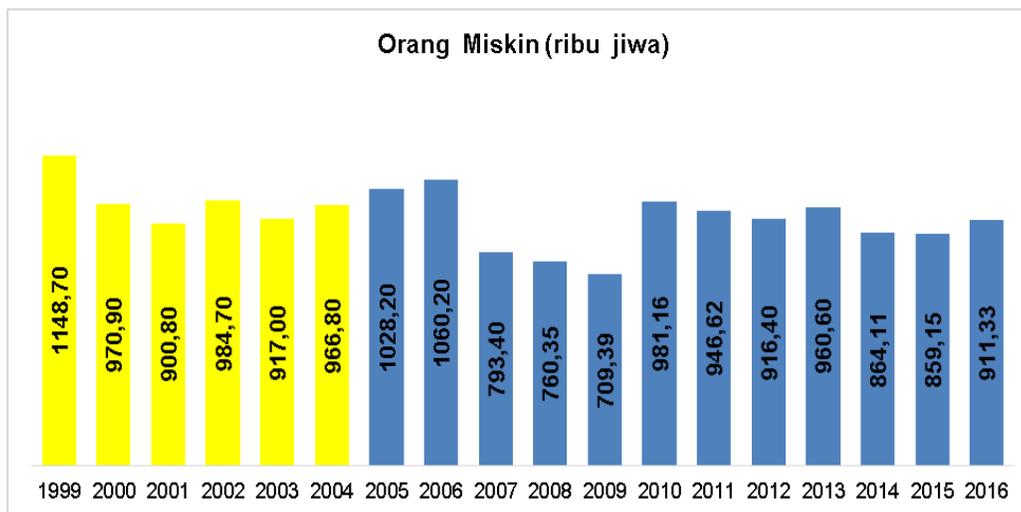
Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja juga mengalami penurunan yakni berjumlah 861.69 jiwa, padahal tahun sebelumnya berjumlah 1143.65 jiwa. Namun di tahun selanjutnya dari tahun 2006 hingga tahun 2013 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari yang totalnya berjumlah 884.85 pada tahun 2006, hingga di tahun 2013 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan hingga 1.634.33 jiwa. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja mengalami sedikit penurunan menjadi 1617.44 jiwa, hingga jumlah tenaga kerja kembali meningkat di tahun 2015 dan 2016 mencapai 1664,49 jiwa.

Sebelum pemekaran yaitu kurun waktu 1999 – 2004 rata-rata tenaga kerja adalah 1023,96 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 21,74 persen. Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata tenaga kerja berjumlah 1320,60 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 71,84 persen

**Keadaan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua**

Selama 17 tahun terakhir (1999-2016) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik, yakni tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,13 persen yaitu dari 54,75 persen. Yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Pada lima tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode maret 2010-maret 2011 dengan terdapat 4,82 persen penduduk yang pada 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan bergeser di atas garis kemiskinan sehingga tidak menjadi miskin.

**Gambar 2.**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua (ribu) Tahun 1999 – 2016**



Sumber : BPS Papua, 2000 – 2017

Pada awal setelah pemekaran jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hanya beberapa persen. Dengan demikian secara tidak langsung mengalami peningkatan juga beberapa persen. Pada tahun ke 3 setelah pemekaran, yakni pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang drastis yakni berjumlah 10.282,00 jiwa

Lain halnya dengan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sebanyak 1.060,20 jiwa, mengalami penurunan hingga tahun 2009, yang jumlah orang miskinnya mencapai 709,39 jiwa. Namun pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan berjumlah 981,16 jiwa. Pada tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan mencapai 859,15 jiwa. Dan di tahun 2016 jumlah kemiskinan meningkat sebesar 911,33 jiwa.

Sebelum pemekaran yaitu kurun waktu 1999 – 2004 rata-rata penduduk miskin adalah 981,48 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar -14,83 persen. Periode Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata penduduk miskin berjumlah 899,24 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar -1,08 persen.

### Hasil Analisis

Hasil analisis pengaruh tenaga kerja (orang bekerja) dan kemiskinan (penduduk miskin atau orang miskin) di Provinsi Papua dengan menggunakan Dummy Variabel (sebelum dan sesudah pemekaran), tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Ringkas Hasil Analisis Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Variabel Dummy**

Variabel	$\beta$	t-hitung	t-tabel	Sig.
Dummy (Pemekaran Wilayah)	-0,0002	-0,0021	2,119	0,9983
Tenaga Kerja	-82,18	-1,3866	2,119	0,1858
Intersep	981,68			
Koef. Korelasi (R)	0,37			
Koef. Determinasi (R <sup>2</sup> )	0,1416			
F-Hitung	1,2369			
F-Tabel	3,7389			

Sumber : Hasil Analisis, 2018 (Terlampir)

Berdasarkan ringkasan hasil analisis diatas dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = 981,68 - 0,0002\text{Dummy} - 82,18 \text{ tenaga kerja} + \varepsilon$$

Nilai intersep atau konstanta sebesar 981,68, angka ini menunjukkan bahwa nilai variabel bebas (tenaga kerja dan pemekaran wilayah) = 0, maka jumlah orang miskin di Provinsi Papua sebesar 981,68 dibulatkan 982 orang.

Untuk mengetahui derajat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilihat dari koefisien korelasi (R). Dari hasil perhitungan, koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,37 nilai mengandung arti bahwa korelasi antar variabel bebas dan terikat sangat lemah.

Kemudian untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dari hasil perhitungan dengan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,1416 atau 14,16 persen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas pada model yang disajikan dapat menjelaskan, yaitu besarnya persentase sumbangan variabel bebas sebesar 14,16 persen terhadap naik turunnya variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 85,84 persen ditentukan oleh variabel lain di luar model tersebut.

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,2369, sedangkan nilai F tabelnya sebesar 3,7389<sub>(0,05;2;14)</sub>. Karena F hitung < F tabel berarti secara simultan (menyeluruh) variabel-variabel bebas (tenaga kerja dan pemekaran wilayah) tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat (kemiskinan).

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemekaran wilayah memiliki nilai t hitung sebesar -0,0021 dengan tingkat signifikansi 0,9983 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,1199<sub>(0,05;16)</sub>, hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung < nilai t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dummy secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (penduduk miskin).

Variabel tenaga kerja memiliki nilai t hitung sebesar -1,3866 dengan tingkat signifikansi 0,1858 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,1199<sub>(0,05;16)</sub>, hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung < nilai t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel penduduk miskin.

## Pembahasan

Hasil analisis diketahui bahwa Koefisien variabel dummy (sebelum dan sesudah pemekaran) tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (orang miskin) dengan nilai signifikan sebesar 0,9983. Variabel dummy ini menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan pengaruh masa sebelum pemekaran (1999- 2004) dan masa sesudah pemekaran (2005-2016). Dengan nilai koefisien variabel Dummy bertanda negatif (-0,0021) membuktikan bahwa pengaruh proses pemekaran sangat kecil perannya dalam model. Dengan menganggap semua variabel konstan, jika terjadi pemekaran maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar 0,0021persen. Sebaliknya jumlah penduduk miskin akan mengalami perubahan (meningkat atau menurun) dengan asumsi variabel lain tetap jika tidak terjadi pemekaran.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui pula bahwa nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar -82,18. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 1000 orang maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 82,18 atau dibulatkan 82 orang. Jumlah tenaga kerja tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Papua, dengan nilai signifikan sebesar 0,1858 >  $\alpha$  sebesar 0,05, dan jumlah tenaga kerja (orang bekerja) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin (orang miskin) di Provinsi Papua selama kurun waktu penelitian 1999 - 2016.

Dalam hal ini, Ajdaoke (2012), mengemukakan bahwa salah satu dampak sebagai akibat dari adanya pemekaran adalah penduduk miskin lebih terkonsentrasi pada DOB (Daerah Otonom Baru). Meskipun terjadi pengurangan kemiskinan di seluruh daerah, terlihat bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke DOB. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin justru jadi terkonsentrasi di DOB. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah induk, meski kesejahteraan DOB telah

relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Lebih dari itu, indikator pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa daerah pemekaran (daerah baru dan daerah induk) memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari rata-rata daerah secara keseluruhan dan daerah kontrol.

Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah DOB dari daerah induk maupun daerah lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam, juga keterbatasan sumber daya manusia (penduduk miskin cukup banyak), dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik. Masalah-masalah yang dihadapi pada aspek ekonomi cukup beragam dan belum kondusif dalam menggerakkan investasi, pola belanja aparatur, dan pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung perekonomian lokal karena masalah tempat tinggal aparatur, pemilihan ibukota kabupaten yang belum dapat menciptakan pusat perekonomian di DOB, keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang pusat fasilitas pemerintahan (Ajdaoke, 2012).

Sedangkan Arianti & Cahyadinata (2013), melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan daerah pesisir di Provinsi Bengkulu sebelum pemekaran wilayah sama atau tidak berbeda dengan setelah pemekaran wilayah. Ajdaoke (2012), menyatakan bahwa pada dasarnya, pemekaran daerah di Indonesia di bentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Dengan adanya pemekaran daerah di harapkan setiap kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi oleh pemerintah dapat di identifikasi dan terkoordinir dengan baik sesuai dengan potensi masing-masing. Namun jika dilihat dari konsepnya, peran pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan masyarakat, karena dia merupakan unit yang terdekat dengan masyarakat kesalahan bukan terletak dari kebijakan yang ada, namun lebih kepada kinerja para aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

## **P E N U T U P**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum pemekaran yaitu kurun waktu 1999 – 2004 rata-rata tenaga kerja adalah 1023,96 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 21,74 persen. Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata tenaga kerja berjumlah 1320,60 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 71,84 persen.
2. Sebelum pemekaran yaitu kurun waktu 1999 – 2004 rata-rata jumlah penduduk miskin adalah 981,48 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar -14,83 persen. Periode Setelah pemekaran kurun waktu 2005 – 2016 rata-rata penduduk miskin berjumlah 899,24 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar -1,08 persen.
3. Hasil analisis diketahui bahwa Koefisien variabel dummy (sebelum dan sesudah pemekaran) tidak signifikan terhadap jumlah orang miskin dengan nilai signifikan sebesar 0,9983. Variabel dummy ini menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan pengaruh masa sebelum pemekaran (1999 - 2004) dan masa sesudah pemekaran (2005-2016). Dengan nilai koefisien variabel Dummy bertanda negatif (-0,0021) membuktikan bahwa pengaruh proses pemekaran sangat kecil perannya dalam model. Dengan menganggap semua variabel konstan, jika terjadi pemekaran maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar 0,0021 persen. Sebaliknya jumlah penduduk miskin akan mengalami perubahan (meningkat atau menurun) dengan asumsi variabel lain tetap jika tidak terjadi pemekaran. Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui pula bahwa nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar -82,18. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 1000 orang maka akan menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 82,18 atau dibulatkan 82 orang. Jumlah tenaga kerja tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua, dengan nilai signifikan sebesar  $0,1858 > \alpha$  sebesar 0,05, dan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua selama kurun waktu penelitian 1999 - 2016.

## Saran dan Rekomendasi

Berkaitan dengan hasil penelitian maka penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara konsisten untuk melakukan evaluasi terhadap wilayah pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB), meliputi : a) kinerja perekonomian daerah; b) kinerja keuangan daerah; dan c) kinerja pelayanan publik; sertad) kinerja aparatur pemerintah daerah;
2. Evaluasi terhadap daerah pemekaran perlu dilakukan secara ketat sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku. Bila diketahui kinerja tidak memuaskan atau tidak memenuhi target maka harus dikembalikan kepada wilayah induk atau bergabung pada wilayah tetangganya.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan suatu perencanaan yang menyeluruh dan terpadu berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ....., 1999 – 2017, Papua Dalam Angka Provinsi Papua 1999 – 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura;
- Ajdaoke. (2012). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, [Online]. Tersedia: <https://ajdaoke.wordpress.com/2012/03/10/dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-kesejahteraan-masyarakat/>, (Diakses 02 Juli 2018);
- Arianti Nyayu Neti, & Cahyadinata Indra. (2013). Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu. Laporan Penelitian. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu;
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura;
- Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES. Jakarta;
- Chaniago Junaidi, (2008). Regresi Atas Variabel Dummy, [Online], (<https://junaidichaniago.wordpress.com/2008/09/22/regresi-atas-variabel-dummy/>), diakses 04 Juli 2018);
- De Quelyoe, F. Y., Ratang, S., & Wakarmamu, C. M. (2016). The Impact of Poverty Reduction Program into Papuan Women Economy Behavior in District of Kemtuk Gresi, Jayapura Regency (Case Study). *Journal of Education and Vocational Research*, 7(2), 41-46;
- Harahap, Yuanita. (2006). Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya Dengan kemiskinan di Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar). Laporan Penelitian. Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan;
- Henny Oktavianti, (2008). Menelaah Kemiskinan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2008, FEB Unibraw, Malang;
- Jarnasy, Owin. (2004). Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Belantika, Jakarta
- Khairullah & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat, Pascasarjana UGM, Yogyakarta;
- M. Dawam Rahardjo. (1984). Transformasi Pertanian, Industri dan Kesempatan Kerja. UI –Press, Jakarta;
- Mankiw, N., Gregory. (2013). Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia. Salemba Empat, Jakarta;
- Mulyadi, Subri. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Nugroho, Heru. (1995). Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan. Aditya Media. Yogyakarta;
- Nur Ellah. (2016). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 4, No. 1 2016, Universitas Brawijaya, Malang;
- Putri, Agustina Mega Puspitasari. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya*; Yogyakarta;
- Rasyid, Ryaas. (2007). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Simanjuntak, Payaman. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta;

- Sugiyono. (2004). *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung;
- Sulaiman Abdu. (2015). *Macam - Macam Teknik Analisis Data*, [Online], (<http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html>, diakses 26 Juni 2018);
- Sumarsono, Sony. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Suryawati, Chriswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan secara Multidimensional*, JMPK Vol. 08/No.03/September/2005, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy;
- Susiati Dwi. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY Tahun 2004 – 2010*, Tesis Tidak dipublikasi, Program Studi S2 Magister Ekonomi Pembangunan, FEB UGM, Yogyakarta;
- Udiarto, Agustinus Kaeng. (2015). *Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015, Universitas Diponegoro, Semarang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- Yaung, Yohanes; Hafizrianda, Yundi; Rumlatur, Tince. (2017). *Analisis Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Tanaman Kakao Di Kampung Sarmai Atas Distrik Namblong Kabupaten Jayapura*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 1, April 2017;
- Zahara Rita. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonom, Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Aceh (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar dan Pidie)*. FMIPA – UNSYIAH, Banda Aceh.